

PERANAN KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN UNTUK MENEKAN LAJU DEFORESTASI TAMAN NASIONAL TESSO NILO

THE ROLE OF THE STATE POLICY ON FOREST PROTECTION TO REDUCE DEFORESTATION OF TESSO NILO NATIONAL PARK

Arifin A.R. Manurung¹, M. Mardhiansyah², Rudianda Sulaeman²
(Departemen of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Riau)
Adress Bina Widya Km 12,5 Panam, Pekanbaru, Riau
Email: arifinmanurung140392@yahoo.com

ABSTRACT

Tesso Nilo National Park is a nature conservation area which was established in 2004, located in Riau Province. The National Park has experienced deforestation of 4.813,9 ha/year period from 2004 to 2013. The resolution mechanism of deforestation which happens comprehensively in National Park Tesso Nilo, one of them is by applying the forest protection policies. Since the function of the National Park as a life support system protection, preservation of biological diversity, sustainable use of natural resources and ecosystems. The purpose of this study is to determine the role of state policy in reducing the rate of deforestation and identify contributing factors in Tesso Nilo. Methods of data collection were documentation, interview and questionnaires. The sampling techniques were purposive and quoted sampling. The total sample of this research were 25 people, 2 persons from Hall of National Park Tesso Nilo, 2 persons from non-governmental organization, one person from Forestry Service and 20 local people around National Park Tesso Nilo. The data obtained, processed using percentage technique and arranged in the form of tables, so it can be deduced. The results showed the implementation of state policy in Tesso Nilo has small role in reducing deforestation, this is due to lack of socialization to the community. In justice to the surrounding community, lack of socialization and law enforcement, lack of infrastructure, unleashing the spread of palm oil fruit from the region have become the caused of deforestation in Tesso Nilo.

Keyword : Policy, Deforestation, National Park

PENDAHULUAN

Taman Nasional Tesso Nilo terletak pada dua kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. Secara keseluruhan luas kawasan lindung TN Tesso Nilo yang dideklarasikan pada 19 Juli tahun 2004 memiliki luas 38.576 Ha. Seluas 36.870 Ha kawasan terdapat di Kabupaten Pelalawan dan sekitar 1.706 Ha adalah kawasan yang termasuk di Kabupaten Indragiri Hulu (Keputusan Menteri Kehutanan Republik

Indonesia Nomor : 255/Kpts-II/2004). Pada 19 Oktober 2009 TN Tesso Nilo mengalami perluasan menjadi 83.068 Ha. (Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 663/Menhut-II/2009).

Kegiatan perambahan dan konversi terjadi dan mengakibatkan kerusakan lahan pada kawasan lindung TN Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan sudah sangat mengkhawatirkan. Menurut hasil investigasi Balai TN Tesso Nilo dan WWF

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

(*World Wide Fund*) Riau, perambahan marak terjadi hingga tahun 2009 menyebar di sepanjang jalan koridor dan pusat-pusat perkampungan. Luasnya mencapai 28.606,08 Ha atau 34,5% dari luas TN Tesso Nilo. Empat lokus terluas adalah Koridor PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) Ukui–Gondai (8.242,34 Ha), Kuala Onangan Toro Jaya (7.769,27 Ha), Bagan Limau (3.852,21 Ha), dan Toro Makmur (2.440 Ha). Perambahan ini telah terjadi sejak tahun 1992, jauh sebelum TN Tesso Nilo ditetapkan atau masih kawasan pemegang ijin HPH (Hak Pengusahaan Hutan).

Salah satu cara perlindungan hutan Tesso Nilo yaitu diterbitkannya beberapa kebijakan perlindungan kawasan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tersebut pada dasarnya adalah untuk mengatasi permasalahan yang mengancam kerusakan Sumber Daya Hutan (SDH) dan Lingkungan Hidup (LH), meningkatkan dan menguatkan kembali komitmen dan dukungan sektor kehutanan terhadap pembangunan nasional (ekonomi, sosial, ekologi), mendukung peran masyarakat dalam mengelola SDH untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, serta menciptakan kepastian dan kemantapan berusaha dibidang pengelolaan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kebijakan perlindungan hutan dalam menekan laju deforestasi dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab deforestasi di TN Tesso Nilo.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan di TN Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu Bulan Juli-Agustus 2014. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data laju deforestasi TN Tesso Nilo 10 (sepuluh) tahun terakhir, kebijakan negara tentang perlindungan hutan di TN Tesso

Nilo dan kuesioner. Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain : alat tulis, kamera digital, *tape recorder*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif*, yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala sosial yang ada, mengungkapkan fakta, variabel dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan serta menyajikan data apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara dokumentasi dan wawancara serta kuesioner. Jenis data yang digunakan Data Primer dan data sekunder. Analisis data pada penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* dengan menggunakan teknik analisis persentase. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan hasil wawancara, kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis presentase. Menurut Adriani (2012) teknik analisis persentase adalah data yang diperoleh dari responden di lapangan disusun dalam tabel-tabel ,selanjutnya dilakukan penilaian analisis persentase (%) dan disimpulkan berdasarkan kecenderungan pada tiap-tiap jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan *quoted sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan *quoted sampling* adalah metode memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang diinginkan. Seluruh instansi maupun lembaga yang terkait, dari jumlah itu diambil 5 (lima) orang sebagai informan kunci karena dianggap

menguasai permasalahan yang sedang diteliti dan informan dari masyarakat yang bermukim terdekat dengan kawasan TN Tesso Nilo diambil 20 (dua puluh) informan secara acak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Laju Deforestasi TN Tesso Nilo 2004-2013

Taman Nasional Tesso Nilo kurun waktu 10 tahun terakhir (2004-2013) telah kehilangan tutupan hutannya sebesar 48.139 ha atau 66,16 % (Tabel 1). Artinya Tesso Nilo yang memiliki luas 83.068 ha sejak perluasan di tahun 2009, memiliki 72.720 ha tutupan hutan dan telah mengalami kehilangan sebesar 4.813,9 ha atau 5,79 % per tahun. Ini setara dengan 13 lapangan bola per hari (ukuran lapangan bola 110 m x 90 m). Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo saat ini yang masih berhutan tersisa 24.581 ha.

Tabel 1. Laju deforestasi TN Tesso Nilo

No	Tahun	Luas Deforestasi ha/tahun	Laju Deforestasi %
1	2004	774	1,06
2	2005	3.022	4,15
3	2006	5.304	7,29
4	2007	2.531	3,48
5	2008	4.807	6,61
6	2009	6.245	8,58
7	2010	3.674	5,05
8	2011	6.490	8,92
9	2012	5.361	7,37
10	2013	9.931	13,65
Jumlah		48.139	66,16
Sisa tutupan hutan		24.581 ha	

Sumber : World Wide Fund(WWF) Riau, 2014

B. Kebijakan yang diterapkan di TN Tesso Nilo

Beberapa kebijakan negara yang diterapkan di TN Tesso Nilo, seperti :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

C. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan TN Tesso Nilo

Kebijakan publik akan efisien jika difokuskan pada fungsi manajemen, dimana saat sosialisasi program tersebut dapat merata. Masyarakat akan dapat mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan serta aturan-aturan yang jelas. Sosialisasi adalah salah satu tolak ukur berhasilnya implementasi kebijakan yang diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Sosialisasi kebijakan negara dalam perlindungan hutan untuk menekan laju deforestasi di TN Tesso Nilo dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sosialisasi kebijakan

Alternatif Jawaban	Responden	
	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Ada Sosialisasi	0	0%
Tidak ada Sosialisasi	20	100%
Jumlah	20	100%

Sumber : Olahan data tahun, 2014

Hasil Tabel 2 menunjukkan bahwa 100% masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga tidak mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan negara dalam perlindungan hutan Tesso Nilo. Ini menjadi suatu kelemahan dalam kinerja

Balai Taman Nasional. Kebijakan negara dalam bentuk perundang-undangan yang diharapkan dapat berkontribusi besar untuk menekan kerusakan khususnya deforestasi di Tesso Nilo, gagal menjalankan perannya karena tidak ada sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat menganggap tidak ada larangan jika mereka melakukan kegiatan seperti pembukaan lahan untuk kebun didalam kawasan TN Tesso Nilo.

D. Pemahaman Masyarakat Terhadap TN Tesso Nilo

Informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap TN Tesso Nilo sangat penting karena selain terkait dengan keberhasilan pengelolaan, pemahaman masyarakat akan keberadaan, tujuan, manfaat, dan dampak Taman Nasional juga mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Taman Nasional itu sendiri.

Kelancaran pengelolaan Taman Nasional tidak terlepas dari peran masyarakat. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Kuswanda (2011) yang menyatakan berbagai kritik, protes dan perlawanan rakyat yang terus berlanjut mendorong menguatnya kesadaran baru tentang pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan mengelola hutan tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dari masyarakat. Pemahaman masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga tentang keberadaan TN Tesso Nilo tercantum pada Tabel 3.

Masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga Kabupaten Pelalawan seluruhnya mengetahui keberadaan TN Tesso Nilo yaitu 100% (Tabel 3). Berdasarkan pengamatan di lapangan, masyarakat mengetahui TN Tesso Nilo disebabkan pintu masuk (Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I) berada di Desa Lubuk Kembang Bunga dan dengan hadirnya Taman Nasional ini, akses masuk masyarakat ke hutan semakin dibatasi.

Tabel 3. Mengetahui keberadaan TN Tesso Nilo di Desa Lubuk Kembang Bunga

Pemahaman Masyarakat Terhadap TN Tesso Nilo	Jawaban Responden			
	Ya		Tidak	
	F	%	F	%
Keberadaan	20	100%	-	-
Tujuan	14	70%	6	30%
Manfaat	6	30%	14	70%

Sumber : Olahan data tahun, 2014

Responden yang mengetahui tujuan dari didirikannya TN Tesso Nilo hanya sekitar 70%. Hasil pengamatan di lapangan, masyarakat mengetahui tujuan berdirinya Taman Nasional ini sebagai pusat konservasi gajah. Hal ini diperkuat dengan berdirinya Camp Flying Squad dan adanya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Balai Taman Nasional. Masyarakat berpendapat bahwa tujuan TN Tesso Nilo hanya disosialisasikan pada sebagian pihak.

Masyarakat yang merasakan manfaat merupakan masyarakat yang berhubungan baik dengan pihak Taman Nasional, misal masyarakat yang tergabung dengan Asosiasi Madu Tesso Nilo, *Flying Squad*, dan MPA (Masyarakat Peduli Api) sebesar 30%. Mayoritas masyarakat kecewa terhadap kehadiran Taman Nasional dan merasa kehadiran TN Tesso Nilo membawa kerugian terhadap masyarakat karena tidak dapat mengendalikan gajah-gajah sehingga merusak lahan perkebunan sawit dan dilarang mengambil kayu yang sebagaimana masyarakat pribumi lakukan sebelum TN Tesso Nilo dibentuk Hal ini akan menjadi sebuah ancaman bagi kelestarian hutan kawasan. Masyarakat yang kecewa akan bertindak semaunya untuk mendapatkan manfaat dari kehadiran TN Tesso Nilo, hal ini karena ketidakpercayaan terhadap pihak pengelola dan akan menjadi sebuah ancaman bagi kolaborasi sebab tercipta kesenjangan sosial antar masyarakat bahkan dengan

pihak pengelola, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik

Wiratno (2004) *dalam* Indah dan Mamonto (2012) persepsi masyarakat menyangkut pengelolaan kekayaan sumberdaya alam daerah yang berorientasi pada peningkatan sosial ekonomi berhadapan dengan misi perlindungan yang diemban kawasan konservasi taman nasional. Perbedaan pemahaman memicu permasalahan gangguan hutan antara lain perburuan illegal, pemungutan hasil hutan tanpa ijin hingga perambahan. Sehingga kondisi masyarakat tersebut perlu diketahui agar pengelolaan kawasan konservasi dapat diarahkan pada sistem kolaborasi yang dapat dilaksanakan berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah daerah dan pengelola kawasan

E. Bentuk Pengelolaan TN Tesso Nilo Terhadap Masyarakat

Pengelolaan kawasan TN Tesso Nilo berbentuk kegiatan-kegiatan yang dimulai dengan rencana pengelolaan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan agar dapat memberikan fungsi dan manfaat yang optimal bagi kelestarian kawasan serta dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Responden yang mengetahui pengelolaan hutan yang diterapkan TN Tesso Nilo yaitu 70%. Masyarakat yang mengetahui akan sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Balai TN Tesso Nilo adalah masyarakat yang bekerja dan pernah menghadiri musyawarah dengan pihak Taman Nasional. Sedangkan 30% informan tidak mengetahui proses pengelolaan TN Tesso Nilo. Hal ini disebabkan sosialisasi yang tidak merata dari pihak Taman Nasional dan masyarakat yang pernah mengikuti musyawarah tidak melihat implementasi yang nyata sehingga tidak berminat untuk menyampaikan kepada masyarakat lain.

Tabel 4. Bentuk pengelolaan TN Tesso Nilo

Daftar pertanyaan	Jawaban Responden			
	Ya		Tidak	
Bentuk Pengelolaan TN Tesso Nilo	F	%	F	%
Pengelolaan	14	70%	6	30%
Komunikasi	7	35%	13	65%
Musyawarah	3	15%	17	85%
Partisipasi masyarakat	13	65%	7	35%
Kontribusi TN Tesso Nilo	2	10%	18	90%
Tanggapan masyarakat	15	75%	5	25%
Tanah masyarakat di Kawasan TN Tesso Nilo	9	45%	11	55%

Sumber : Olahan data tahun, 2014

Masyarakat yang berkomunikasi baik dengan pihak Tesso Nilo sebesar 35%, sebaliknya 65% masyarakat komunikasinya terhadap pihak TN Tesso Nilo tidak baik. Komunikasi masyarakat terhadap TN Tesso Nilo yang sangat rendah sehingga koordinasi antar kedua belah pihak juga rendah. Sehingga dalam berkolaborasi tidak efektif, jika tidak ada sinkronisasi antar kedua belah pihak, hal ini tentu akan berdampak dalam keberhasilan dalam menjaga kawasan TN Tesso Nilo dari ancaman penyebab deforestasi. Komunikasi berperan sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa komunikasi, tujuan atau sasaran yang telah direncanakan tidak akan tercapai (Kurniawan, 2013).

Komunikasi yang kurang akan menjadi sebuah kelemahan yaitu akan selalu muncul kesalahpahaman hingga timbul persepsi yang saling bertolak belakang antar kedua pihak. Musyawarah yang sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat kita dalam menyelesaikan setiap persoalan akan sulit terwujud. Masyarakat yang melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi mengenai awal penetapan TN Tesso Nilo yaitu 15%. Sedangkan

sebanyak 85% responden yang menjawab bahwa mereka tidak ikut serta dalam musyawarah untuk penetapan TN Tesso Nilo, hal ini sejalan dengan komunikasi yang tidak terjalin baik antara masyarakat dan pihak Taman Nasional.

Sadono (2013) mendefinisi peran serta masyarakat adalah sebagai usaha untuk melibatkan masyarakat dalam mendefinisikan permasalahan dan usaha untuk mencari pemecahan masalah. Kunci utama dari peran serta masyarakat adalah pembentukan kerja sama berdasarkan pada kepercayaan dan keterbukaan. Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui perseorangan maupun kelompok. Peran serta masyarakat dalam bentuk kelompok dipandang lebih kuat dan menjanjikan.

Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan Taman Nasional sebesar 75% dari 20 responden. Mereka adalah masyarakat yang tergabung dalam kegiatan pengelolaan madu, mahot gajah, masyarakat peduli api, dan masyarakat yang sukarela sebagai informan terhadap kasus perambahan ataupun illegal logging. Namun, masyarakat dari luar Desa Lubuk Kembang Bunga bebas membakar, merambah, membuka lahan dan menjadikan TN Tesso Nilo kebun sawit tanpa ada penanganan dari pihak terkait. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial, masyarakat merasa diperlakukan tidak adil karena masyarakat luar lebih berkuasa dan lebih sejahtera dibanding mereka yang sudah lama menetap. Pada akhirnya partisipasi masyarakat Lubuk Kembang Bunga mulai luntur menyebabkan sebanyak 35% masyarakat tidak ikut berpartisipasi. Masyarakat lebih memilih mengurus kebun yang nyatanya dapat menghidupi keluarga mereka.

Mayoritas responden masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga, 90% menjawab tidak ada kontribusi yang diberikan oleh TN Tesso Nilo kepada masyarakat. Namun ada beberapa masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Petani Madu Tesso Nilo, yaitu 10%

menjawab ada kontribusi yang diberikan oleh pihak Taman Nasional berupa bantuan pengelolaan dan pemasaran madu.

Adanya kontribusi Taman Nasional kepada masyarakat secara merata sebenarnya akan dapat mempengaruhi persepsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap TN Tesso Nilo meskipun pemberian kontribusi tidak diatur dalam pengelolaan Taman Nasional. Kontribusi yang diberikan akan membuat masyarakat lebih mudah dirangkul dalam kolaborasi pengelolaan. Ancaman pengrusakan dari masyarakat sekitar TN Tesso Nilo akan dapat dikurangi dan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menjaga kawasan dari berbagai ancaman yang merusak kelestarian Tesso Nilo.

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 20 responden terdapat 75% yang menjawab ada tanggapan dari masyarakat yang ingin disampaikan kepada pihak Balai TN Tesso Nilo baik itu kepentingan bersama maupun sendiri. Sebagian dari masyarakat lebih memilih diam dan tidak berkomentar apapun untuk TN Tesso Nilo sebanyak 25%, ini disebabkan masih adanya ketidakpedulian kalangan masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi dengan TN Tesso Nilo.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang ingin mengatakan keinginannya tetapi berdasarkan pengalaman, keinginan-keinginan yang pernah disampaikan tidak mendapat tanggapan dari pihak TN Tesso Nilo serta kesempatan yang belum ada untuk menyalurkan aspirasi mereka juga menjadi faktor sebagian masyarakat lebih memilih untuk diam. Hal ini terbukti dari Kantor Seksi Pengelolaan Wilayah I TN Tesso Nilo yang sering kosong. Sebagian masyarakat lainnya bergabung dengan aparat desa untuk memperjuangkan hak bersama yaitu menuntut keadilan akan penguasaan lahan di kawasan Tesso Nilo. Karena berdirinya TN Tesso Nilo masyarakat Lubuk Kembang Bunga belum merasa meningkat kesejahteraannya

berbeda jauh dari sebelum Taman Nasional ada.

Tanah atau kebun merupakan prioritas yang sangat mendukung saat ini bagi perekonomian masyarakat. Rata-rata warga Desa Lubuk Kembang Bunga memiliki kebun sendiri yaitu sawit. Sebagian masyarakat memiliki tanah yang berada di dalam kawasan konservasi karena masyarakat yang pada awalnya hidup bergantung pada hutan mengklaim bahwa hutan merupakan tanah milik masyarakat.

Menurut Awang *dalam* Purnomo (2011) menyatakan bahwa negara menganggap kuasa terhadap sumber daya alam merupakan mutlak serta hanya layak dikelola atas kekuasaan negara. Sehingga negara dapat memberikan wewenang kepada pihak Balai TN Tesso Nilo untuk mengelola hutan. Kondisi seperti ini yang menyebabkan kerugian dan kekecewaan bagi masyarakat di Desa Lubuk Kembang Bunga. Tanah yang selama ini dipertahankan masyarakat diambil oleh Balai TN Tesso Nilo sehingga perluasan tanah untuk kebun semakin susah karena lahan mereka sudah dikelilingi oleh pihak perusahaan sawit, perusahaan hutan tanaman dan kawasan TN Tesso Nilo.

Responden yang menjawab masih ada lahan masyarakat berada di kawasan TN Tesso Nilo (Tabel 4) yaitu 45%. Sedangkan 55% responden yang menjawab tidak ada lahan masyarakat yang berada di kawasan TN Tesso Nilo. Kondisi ini hampir berimbang, masyarakat yang memiliki lahan kebun di dalam Taman Nasional berpendapat bahwa tapal batas TN Tesso Nilo tidak jelas. Sepengetahuan masyarakat lahan yang mereka garap sekarang ini merupakan eks lahan INHUTANI IV. Sosialisasi perluasan kawasan TN Tesso Nilo di tahun 2009 tidak ada kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan penuturan Muslim (JIKALAHARI) yang menyatakan sosialisasi perluasan TN Tesso Nilo sangat kurang.

F. Perlindungan TN Tesso Nilo

Desa Lubuk Kembang Bunga sebagai desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional, masyarakatnya sadar bahwa Tesso Nilo mengalami ancaman tersebut.

Tabel 5. Perlindungan TN Tesso Nilo

Daftar pertanyaan	Jawaban Responden			
	Ya		Tidak	
	F	%	F	%
Perlindungan TN Tesso Nilo				
Ancaman TN Tesso Nilo	19	95%	1	5%
Dampak dari TN Tesso Nilo	20	100%	-	-

Sumber : Olahan data tahun, 2014

Mayoritas masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga telah menyadari bahwa TN Tesso Nilo sebagai kawasan konservasi yang telah mengalami ancaman kelestariannya adalah 95% sedangkan 5 % lainnya tidak tahu. Kesadaran masyarakat ini didapat dari fakta yang mereka lihat sendiri di lapangan. Aktivitas seperti perambahan dan illegal logging yang menjadi salah satu faktor penyebab deforestasi di TN Tesso Nio, pada akhirnya menjadi kebun sawit sering masyarakat Lubuk Kembang Bunga saksikan.

Mayoritas masyarakat disekitar kawasan TN Tesso Nilo adalah masyarakat pekebun yang dulunya adalah masyarakat yang menggantungkan hidup pada hasil pertanian dan hasil hutan. Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi pada TN Tesso Nilo menunjukkan rendahnya perekonomian masyarakat sekitar kawasan dan telah menimbulkan dampak. Kondisi lahan di Desa Lubuk Kembang Bunga yang terbatas disebabkan desa tersebut berbatasan langsung dengan konsesi HTI, areal perkebunan dan Tesso Nilo. Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum di TN Tesso Nilo menyebabkan maraknya pembukaan lahan di dalam

kawasan Taman Nasional demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dari hasil Tabel 5 menunjukkan bahwa semua masyarakat Lubuk Kembang Bunga mengetahui dampak yang akan terjadi bila hutan terus berkurang. Banjir, kekeringan, gajah berkeliaran, panas, produksi madu berkurang, pendangkalan sungai karena erosi merupakan jawaban masyarakat. Semua dampak ini terjadi di Desa Lubuk Kembang Bunga, hanya banjir yang tidak terlalu mengancam karena terjadi di beberapa titik kebun masyarakat bukan di pemukiman. Dengan dampak yang terjadi ini, seharusnya masyarakat sadar akan perlunya menjaga hutan. Namun ketidakadilan dan aspirasi yang tidak pernah mendapatkan tanggapan dari pihak Balai TN Tesso Nilo membuat masyarakat tidak peduli terhadap hutan.

Masyarakat sekitar kawasan pada umumnya mempunyai keterbatasan tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan sehingga memerlukan dorongan dari pengelola kawasan untuk membangkitkan peran serta masyarakat. Pengembangan partisipasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan peningkatan kesadaran konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan kehutanan mutlak diperlukan, sehingga masyarakat akan berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat maraknya perambahan hutan berupa hilangnya penerimaan negara, harga kayu rendah dan berada di bawah pasaran, kesejahteraan masyarakat semu serta hancurnya industri dalam negeri. Sedangkan dampak ekologi berupa deforestasi dan peningkatan lahan kritis, kualitas ekosistem dan biodiversiti menurun serta rawan bencana seperti kebakaran hutan, banjir, longsor dan kekeringan. Perambahan hutan juga telah mendorong terjadinya pergeseran nilai

sosial budaya warga setempat, hilangnya kearifan sosial penduduk, cinta alam dan sadar lingkungan sirna dan menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat (Susilawati, 2008).

G. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Deforestasi di TN Tesso Nilo 2004-2013

Berdasarkan analisis hasil wawancara terhadap informan kunci, didapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya deforestasi di TN Tesso Nilo yaitu :

- Penetapan Tata Batas Kawasan TN Tesso Nilo Tidak Jelas
- Pemekaran Desa Baru di Sekitar TN Tesso Nilo
- Koordinasi Para Pihak Lemah
- Rendahnya Ekonomi Masyarakat Sekitar TN Tesso Nilo
- Ketegasan Hukum yang Lemah
- Tumpang Tindih Regulasi Pemanfaatan Lahan
- Pembalakan Liar
- Kebakaran Hutan
- Promosi TN Tesso Nilo Lemah
- Sumber Daya Manusia Minim
- Sarana dan Prasarana yang Minim
- Adanya Kekuatan Sosial, Politik, Bisnis dalam Skala Besar Terjadi di TN Tesso Nilo
- Peredaran Buah Sawit Illegal dari TN Tesso Nilo
- Akses Masuk TN Tesso Nilo
- Ketidakadilan Terhadap Masyarakat Asli Sekitar TN Tesso Nilo Akibat Keterlibatan Pekebun Bermodal Besar

H. Arahan Pengendalian Deforestasi di Kawasan Konservasi TN Tesso Nilo

Berdasarkan analisis dari hasil kuesioner kepada masyarakat dan wawancara kepada informan kunci ditemukan beberapa rumusan dalam pengendalian deforestasi di TN Tesso Nilo. Rumusan-rumusan ini dapat menjadi

pertimbangan dalam menekan laju deforestasi di TN Tesso Nilo.

1. Peningkatan efektifitas pengelolaan TN Tesso Nilo melalui penguatan kelembagaan.

Menurut Philip Selznick dalam Sumarwanto (2010), organisasi adalah pengaturan personil guna memudahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui alokasi fungsi dan tanggung jawab. Unsur-unsur organisasi yaitu : kumpulan orang, kerjasama, tujuan bersama, sistem koordinasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, sumber daya organisasi.

Balai TN Tesso Nilo yang resmi berdiri dan aktif berkegiatan tanggal 1 Februari 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional. Sebagai organisasi yang baru, diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan TN Tesso Nilo seperti:

- Penguatan kelembagaan.
- Peningkatan kapasitas petugas TN Tesso Nilo
- Peningkatan sarana dan prasarana
- Penelitian dan pengembangan hasil penelitian di TN Tesso Nilo
- Penguatan data base di TN Tesso Nilo

2. Pengukuhan TN Tesso Nilo sebagai pengelolaan Sumberdaya Alam dengan sistem zonasi.

Pengukuhan Kawasan Hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah kegiatan lanjutan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status, batas, luas dan letak kawasan hutan. Ruang lingkupnya meliputi : Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan

Hutan, Pemetaan kawasan hutan, Penetapan Kawasan Hutan.

Terkait deforestasi di TN Tesso Nilo berhubungan dengan pemantapan kawasan tersebut, perlu dilaksanakan kegiatan :

- Penataan, pembuatan, dan pengukuhan batas kawasan dan zonasi di lapangan
- Sosialisasi tata batas di lapangan

3. Meningkatkan perlindungan TN Tesso Nilo dari berbagai tekanan dan gangguan penyebab deforestasi khususnya melalui kegiatan preventif, preemtif dan represif.

Alam (2010) dalam Susmihara (2013) membagi penanggulangan kejahatan empirik dalam tiga bagian pokok, yaitu pre-emptif, preventif dan represif.

1. Pre-Emtif.

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Kesimpulannya bahwa dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif.

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan.

3. Represif.

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan

hukuman. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan TN Tesso Nilo adalah :

- Patroli intensif dan partisipasif
- Identifikasi daerah rawan terjadi deforestasi akibat *illegal logging*, perambahan, jual-beli lahan dalam kawasan, tumpang tindih lahan dengan perusahaan
- Penyuluhan dan sosialisasi peraturan kehutanan secara rutin
- Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu bagi pelaku kejahatan kehutanan
- Penyelesaian konflik jual-beli lahan dalam kawasan sesegera mungkin.
- Kesepakatan yang kuat dan diikat dengan hukum
- Pendatang baru yang berada didalam kawasan harus segera dikeluarkan. Bagi masyarakat yang sudah lama dan memiliki perekonomian diselesaikan dengan bijak seperti ganti rugi atau lahan yang sudah menghasilkan dapat dipanen satu daur dan tidak ada hak atas lahan tersebut.

4. Meningkatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan dan para pihak terkait dalam pengelolaan TN Tesso Nilo melalui kerjasama kemitraan serta meningkatkan manfaat TN Tesso Nilo dalam pemberdayaan/peningkatan ekonomi masyarakat.

Wahab (2002) disebut sebagai partisipasi, maka sebagian besar yang dimaksud adalah sikap tanggap masyarakat lokal (*local response*) terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang cara-cara baru, pemakaian teknologi dan ksediaan memberikan pengorbanan (dalam arti investasi) modal, waktu, tenaga dan uang untuk tercapainya tujuan-tujuan pembangun. Beberapa program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan hutan

Tesso Nilo dan peningkatan kesejahteraan mereka :

- Pemanfaatan ekowisata untuk dikelola masyarakat
- Pengembangan dan penguatan kapasitas lembaga kolaborasi
- Peningkatan usaha kelompok perempuan dalam pembuatan handy craft dari HHBK TN Tesso Nilo.
- Pengembangan usaha masyarakat melalui pemanfaatan madu secara lestari
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan untuk usaha bagi kelompok masyarakat sekitar kawasan
- Patroli partisipasif bersama masyarakat dalam pengaman hutan.
- Peninjauan kembali hukum adat dan menselaraskannya dengan undang-undang perlindungan hutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan negara yang diterapkan di TN Tesso Nilo untuk perlindungan hutan tidak berperan besar dalam menekan laju deforestasi karena kurangnya sosialisasi dari pihak TN Tesso Nilo.
2. Deforestasi yang terjadi di TN Tesso Nilo disebabkan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat asli sekitar Taman Nasional, kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum oleh pihak TN Tesso Nilo kepada masyarakat, Rendahnya sarana dan prasarana TN Tesso Nilo, lancarnya peredaran TBS yang berasal dari dalam kawasan.

B. Saran

Arahan pengendalian yang telah disusun dan direkomendasikan diharapkan dapat menekan deforestasi di TN Tesso Nilo. Terutama pada daerah yang bersengketa dengan pihak TN Tesso Nilo.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani F. 2012. **Kendala asimilasi Etnis Tionghua dan Etnis Melayu di Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau**. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru. (Tidak dipublikasikan).
- Indah. N. W. dan Mamonto. R. 2012. **Persepsi masyarakat terhadap Taman Nasional dan sumberdaya hutan (studi kasus : Blok Aketawaje, Taman Nasional Aketawaje Lolobata)**. Jurnal Balai Penelitian Kehutanan Manado, volume 2 nomor 1, juni 2012.
- Kurniawan. A. 2013. **Pentingnya Komunikasi**. www. Ari-kurniawan. Fh. Web. Unair. ac . id/artikel. html. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2014.
- Kuswanda. R. 2011. **Rencana kelola sosial dalam rangka Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada kawasan HTI PT.Mityasa Idola di Provinsi Kalimantan Barat**. Skripsi Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. (Tidak Dipublikasikan).
- Purnomo. A. 2012. **Pro-kontra Kebijakan Monatorium Hutan dan Gambut**. Kepustakaan Popular Gramedia. Jakarta.
- Sadono. Y. 2013. **Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali**. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Planologi Universitas Padjajaran, volume 9 nomor 1, maret 2013.
- Sumarwanto. A. 2010. **Analisis pengembangan budaya organisasi**. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Indonesia, Jakarta. (Tidak Dipublikasikan).
- Susilawati. D. 2008. **Analisis dampak dan faktor yang mempengaruhi perambahan hutan (studi kasus : Desa Bulu Hadek, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, Nangroe Aceh Darussalam)**. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan. (Tidak Dipublikasikan).
- Susmihara. T. H. 2013. **Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan illegal logging di Kabupaten Kolaka Utara**. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. (Tidak Dipublikasikan).
- Wahab. A. S. 2002. **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**. Bumi Aksara. Jakarta.